

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JAMINAN  
KEMATIAN (Studi Kasus di Kecamatan Rambah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat – Syarat Memperoleh Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum



Disusun oleh :

**MUL EFENDI**

(1935037)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JAMINAN  
KEMATIAN ( Studi Kasus di Kecamatan Rambah)

SKRIPSI

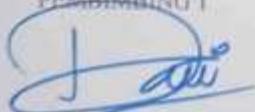
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Penyusun

MUL EFENDI

Nim. 1935037

PEMBIMBING I



Dam Kurniawansyah, S.H,M.Kn  
NIDN.1005118708

PEMBIMBING II



Dr. H. Normizal, Lc, MH  
NIDN 1005117701

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAJAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Nama : MUL EFENDI  
NIM : 1935037  
Bidang Minat : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (Studi Kasus di Kecamatan Rambah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 22 Juni 2023

V / g membuat pernyataan,



MUL EFENDI  
NIM 1935037

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah Ridho dan anugrahnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JAMINAN KEMATIAN ( Studi Kasus di Kecamatan Rambah) ”** dibuat untuk memenuhi tugas dan persyaratan Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan selesaiya tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yaitu sembah dan sujut saya hantarkan kepada kedua orang tau saya, yang jerih payah , susah payah dan doa mereka yang telah membesarakan saya dan untuk membantu saya mengejar cita – cita sampai saat ini, dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada istri saya tercinta dan anak – anak saya yang telah memberikan semangat yang luar biasa sehingga semangat saya yang lemah menjadi membara untuk menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Pada akhirnya proposal ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada. :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak ZULKIFLI, S.H,M.H Selaku Wakil Rektor I di Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penggerjaan skripsi ini.
3. Ibuk Rise Karmila, S.H,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Almadison, S.H.,M.H,CPLC,CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum,Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

5. Bapak Dani Kurniawansyah,S.H,M.Kn selaku Ketua Departemen Hukum Perdata dan Selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, motovasi, saran dan masukan selama penulis Menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Dr.H.Nofrizal,Lc,M.H dan Selaku Pembimbing II Penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, motovasi, saran dan masukan selama penulis Menyelesaikan skripsi ini
7. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum atas menyediakan fasilitas dalam pengerjaan skripsi ini
8. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini, untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapan terimakasih.

Pasir Pengaraian, 22 Maret 2023

MUL EFENDI  
NIM 1935037

## ABSTRAK

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pekerja dan buruh yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Daerah Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu dengan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tersebut diatas berdasarkan Pasal 3 yaitu “peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi pekerja di Kabupaten Rokan Hulu melalui program JKK,JHT,JKM,JP dan JKP sehingga pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak”. Didalam peraturan Bupati diatas untuk mewajibkan penduduk Kabupaten Rokan Hulu untuk ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut “ setiap peserta penerima upah dan bukan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan”.Jenis penelitian ini digolongkan penelitian Hukum Sosiologis (*empiris*).karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Rokan Hulu dan Ahli waris atau anak kandung almarhum. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kajian kepustakaan.Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah pelaksaan terhadap peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu, masih belum maksimal dilaksanakan dikarenakan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan terlalu ringannya sanksi yang diberikan oleh peraturan Bupati diatas. Hambatan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta yang melakukan wanprestasi, bahwa peserta BPJS ketenagakerjaan tidak pernah memberitahukan kepada petugas BPJS Ketenagakerjaan bahwa iurannya bulanannya telah menunggak dan apabila 6 (enam) bulan berturut – turut peserta tidak membayarkan iuran bulanannya, kepesertaannya dihapus secara permanen.

Kata Kunci : program dalam BPJS Ketenagakerjaan,Manfaat yang diterima,bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rokan Hulu.

## **ABSTRACT**

To guarantee legal certainty for workers and laborers in Rokan Hulu Regency, the Regional Government of Rokan Hulu issued Rokan Hulu Regent Regulation Number 42 of 2021 concerning Protection of Workers/Laborers through the Employment Social Security Organizing Agency in Rokan Hulu Regency. As for legal protection for BPJS Ketenagakerjaan participants based on the Rokan Hulu Regent's Regulation above, it is based on Article 3 namely "This Regent's regulation aims to realize social protection for workers in Rokan Hulu Regency through the JKK, JHT, JKM, JP and JKP programs so that workers/laborers can fulfill their basic necessities of life properly". In the Regent's regulation above to require residents of Rokan Hulu Regency to participate in the BPJS Employment program as referred to in Article 4 paragraph (2) it reads as follows "every participant who receives wages and non-participants who do not receive wages is required to take part in the employment social security program organized by BPJS Employment ". This type of research is classified as Sociological Legal research (empirical). because in this research the author directly conducts research at the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Rokan Hulu branch of the Employment BPJS Office and the heirs or biological children of the deceased. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection techniques in this study were interviews and literature review. The conclusion that can be obtained from the results of the research is the implementation of Rokan Hulu Regent Regulation Number 42 of 2021 Concerning Worker/Labor Protection Through the Employment Social Security Administrative Agency in Rokan Hulu Regency, it has not been implemented optimally due to defaults or broken promises for Employment BPJS Participants due to too light sanctions given by the Regent regulations above. Obstacles to Employment BPJS for participants who default, that BPJS Employment participants never inform BPJS Employment officers that their monthly contributions are in arrears and if 6 (six) consecutive months the participants do not pay their monthly contributions, their membership is permanently deleted.

**Keywords:** program in Employment BPJS, benefits received, for participants of the Rokan Hulu Branch of Employment BPJS.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Sejarah atau Tinjauan Ilmiah Tentang Bpjs Ketenagakerjaan .....	10
2.2 Perlindungan Hukum.....	19
2.3 Perlindungan Hukum Menurut Ahli Hukum,.....	20
2.4 Perlindungan Konsumen .....	22
2.5 Tentang Perikatan .....	27
2.6 Perikatan Menurut Mulai dan Berakhirnya .....	28
2.7 Unsur – unsur yang melekat pada Perikatan .....	30
2.8 Bagian – bagian Perjanjian .....	32
2.9 Perjanjian Menurut Ahli .....	33
2.9.1 Asas – asas Hukum Perjanjian .....	34
2.9.2. Pengertian Wanprestasi dan pengertian PMH .....	39
3.0 BPJS Ketenagakerjaan .....	42
3.0.1 Tinjauan Rivieu .....	48
3.0.2 Wanprestasi Menurut Kitap Undang – undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)	

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	52
3.2 Metode Pendekatan .....	52
3.3 Sumber Data.....	52

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian (JKM) Cabang Rokan Hulu.....	57
4.2 Bagaimana cara Klaim Terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian (JKM) Cabanag Rokan Hulu .....	62
4.3. Perikatan Menurut Kitap Undang – undang Perdata.....	71
4.4. wanprestasi pendapat Ahli Hukum .....	71
4.5. Seorang Dapat Dikatakan Wanprestasi Berdasarkan KUHPerdata	71
4.6. Indikator atau perbuatan sehingga seorang melakukan wanprestasi	72
4.7. Defenisi Perikatan.....	73
4.8. Perikatan Menurut Ahli Hukum .....	73
4.9. Macam – Macam Perikatan.....	74
5.0. Perikatan Yang Timbul Kerena Undang – undang.....	77
5.0.1. Sumber Perikatan.....	79
5.0.1. pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan.....	80

### **BAB V. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran .....	85

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **DOKUMENTASI.....**

**BUKU  
PERATURAN  
WEBSITE**